

## ABSTRAK

Kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan merupakan satu langkah pemerintah Kota Semarang untuk memberikan pelayanan terhadap korban kekerasan terutama terhadap perempuan dan anak. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Kebijakan Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, efektifitas Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni Kota Semarang dalam memberikan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan serta hambatan dan solusi dalam memberikan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan di Kota Semarang.

Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui dan menganalisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan di Kota Semarang. (2) Menganalisis efektifitas Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni Kota Semarang dalam memberikan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan. (3) Menganalisis dalam mengatasi hambatan dan solusi pelaksanaan kebijakan dalam memberikan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan di Kota Semarang.

Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum secara yuridis sosiologis dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif analitis. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan wawancara dengan DP3A Kota Semarang, PPT Seruni Kota Semarang dan korban. Dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data Analisa secara kualitatif. Permasalahan dikaji dengan teori kebijakan dan efektifitas hukum.

Hasil dari penelitian bahwa Kebijakan daerah terhadap perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan belum berjalan menyeluruh karena diperlukan sumber yang mendukung kebijakan berjalan efektif antara lain anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasana. Minimnya upaya pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah apalagi dimasa pandemi ini. SOP dan Perwal untuk kebijakan ini juga belum mengatur secara khusus sehingga layanan belum bisa maksimal. Efektifitas PPT Seruni dalam memberikan pelayanan belum sepenuhnya efektif dari sisi layanan menjadi tidak maksimal karena pada pandemi belum adanya Standar operasional layanan yang harus diberikan kepada korban.

**Kata Kunci : Kebijakan pemerintah daerah, perlindungan perempuan dan anak, tindak kekerasan**

## **ABSTRACT**

*The Proliferation of protection of women and children from violence is one step toward the Semarang city government to render service to victims of violence mainly to women and children. The problem in this study is: inconsistency of local government in providing protection of women and children from violence, the effectiveness of the united service center (PPT) Seruni of the Semarang city in stemming the protection for women and children from violence and obstacles and solutions in providing protection for women and children from violence in the Semarang city.*

*The purpose of the study is (1) to analyze local government policies on providing protection of women and children from violence in the Semarang city. (2) analyzing the effectiveness of the united service center (PPT) Seruni the Semarang city union in providing protection for women and children from violence. (3) analyzing policy enforcement barriers and solutions to delivering women and children protection from violence in the Semarang city. The method used by researchers was a sociological jurisdictional approach and specification in the study included analytical descriptive analyses. As for the resources and data types in the research, it is the primary data that comes from an interview field study with the district-city Semarang, PPT Seruni Semarang city and victims. And secondary data obtained from literature studies. Qualitative analysis data. The problem is solved with policy theory and legal effectiveness.*

*The results of the study that regional policies against the protection of women and children from violence have not been made comprehensive because of the need for resources, tools and infrastructure. Government have limited prevention efforts, especially at the time of the pandemic. The soup and delivery of this policy also has not been set up specifically so that service can not be maximum. The effectiveness of the PPT Seruni service has not been fully effective from the service's side to its maximum, as at the latest there is no standard of operational service to be given to the victims.*

***key words: local government policy, women and child protection, follow-through violence***